

BAB II

DINAMIKA PERKEMBANGAN KONFLIK DAN PENGUNGSI SURIAH

Dalam bab ini akan memaparkan secara luas mengenai sejarah konflik Suriah yang diawali dengan fenomena *Arab Spring* di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dampak yang ditimbulkan akibat konflik Suriah tersebut. Pada sub bab berikutnya akan dijelaskan mengenai problematika yang dihadapi pengungsi Suriah, hingga upaya organisasi internasional seperti Liga Arab, Uni Eropa dan PBB dalam menanggapi krisis pengungsi tersebut.

A. Arab Spring dan Konflik Suriah

Fenomena perang menjadi sesuatu hal yang tidak dapat dihindari. Suatu keniscayaan apabila di belahan bumi ini masih terdapat negara dengan negara maupun subjek lainnya yang melakukan perang atas dasar kepentingan mereka, sebagaimana perang yang terjadi di Suriah. Saat ini, Suriah telah memasuki tahun kedelapan dan perang yang selama ini terjadi seolah-olah merupakan perang yang tiada akhirnya. Berbagai pemberitaan internasional di media massa baik cetak maupun digital berlomba-lomba menyampaikan *khobar* dari negara yang berjudul “pintu gerbang sejarah” itu.

Pasca runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat dan Uni Eropa berupaya memperkuat demokratisasi di negara-negara Timur Tengah yang masyhur akan kekayaan sumber daya alam minyak bumi itu (Ghafur, 2014, hal. 88) seperti Tunisia, Libya, Mesir, Arab Saudi bahkan Suriah melalui suatu fenomena yang disebut *Arab Spring*. Demokratisasi tersebut dilakukan dengan cara menyuntikkan semangat revolusi serta menggulingkan rezim kekuasaan yang otoriter di masing-masing negara tersebut.

Arab Spring menjadi fenomena yang secara paksa membawa sistem demokrasi ke dunia Arab yang selama beberapa dekade sebelumnya menerapkan sistem autokrasi.

Demokratisasi tersebut hadir dengan berbagai pertaruhan dan pengorbanan melalui revolusi-revolusi yang menjalar ke berbagai negara dunia Arab. Jack Goldstone menyatakan bahwa sekalipun melalui revolusi dengan cara damai, pada umumnya penerapan demokrasi memerlukan waktu separuh dekade agar sebuah rezim dapat berkonsolidasi dengan masyarakat secara stabil (Yasmine, 2015, hal. 111).

Sistem demokrasi ala Barat dikarakteristikan dengan adanya: pemisahan kekuasaan, pemilu yang bebas, kebebasan warga sipil, hukum, serta adanya penghargaan atas hak asasi manusia seperti kepemilikan pribadi, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, serta toleransi dalam hal beragama (Yasmine, 2015, hal. 111-112). Sebaliknya, prinsip-prinsip tersebut merupakan nilai-nilai yang sepenuhnya baru bagi negara-negara Timur Tengah. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara dunia Arab yang sedang masih gencar melakukan revolusi.

Selama *Arab Spring*, beberapa negara dunia Arab melakukan revolusi menggunakan simbolisme yang serupa, dimana hal tersebut menjadi bukti saling keterkaitan revolusi satu sama lain yang muncul di berbagai negara Arab. Mereka menggunakan cara-cara yang serupa seperti penggunaan sosial media facebook dan twitter untuk memobilisasi massa agar turut serta bersama mereka turun ke jalan untuk berdemonstrasi atau setidaknya menyebarkan semangat revolusi melalui sosial media tersebut. Kemudian, media massa dan televisi setempat juga memainkan peranan yang krusial dalam meningkatkan gelombang demonstrasi. Sebagai contoh penayangan demonstrasi yang disiarkan stasiun televisi Al-Jazeera dan Al-Arabiya yang telah menumbuhkan simpati masyarakat, mendorong mobilisasi, serta sebagai penghubung dengan media-media Barat (Rosiny, 2012, hal. 4).

Arab Spring telah berhasil menyita perhatian dunia karena gelombang protes yang tak kunjung berhenti. Revolusi untuk menuntut hadirnya demokrasi, kebebasan ruang publik, dan tuntutan agar negara-negara yang telah lama berbentuk autokrasi tersebut dapat bergabung dengan modernisme negara

lain hingga kini berada dalam situasi yang rentan akan krisis dan konflik (Yasmine, 2015, hal. 109).

Tunisia menjadi negara pertama yang mengadakan revolusi menuntut turunnya rezim otoriter Zainal Abidin bin Ali yang kemudian disusul oleh Mesir pada 25 Januari 2011 menuntut Presiden Husni Mubarak menanggalkan kursi pemerintahan yang telah ia duduki selama tiga dekade. Presiden Husni Mubarak sempat memerintahkan bala pasukannya dengan mengirim tank-tank ke kota guna memadamkan demonstrasi. Hingga berujung pada pengunduran dirinya tanggal 11 Februari 2011. Seolah tak mau kalah, Yaman, Bahrain, Libya, dan Suriah melakukan demonstrasi antipemerintah di pusat kota dan menyebar hingga ke kota-kota yang lain (Cutler, 2012).

Konflik yang terjadi di Suriah sendiri bukanlah suatu fenomena baru dalam hubungan internasional. Konflik ini meletus pertama kali pada Maret 2011 silam yang ditandai dengan adanya demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa pelajar yang menulis grafiti dengan slogan-slogan anti-pemerintah di tembok-tembok kota (Fahham, 2014, hal. 40). Demonstrasi tersebut terilhami dari fenomena *Arab Spring* yang pertama kali terjadi di Tunisia dimana seorang lelaki berumur 26 tahun bernama Mohamed Bouazizi membakar dirinya di depan khalayak ramai menggunakan cat thinner dan korek api (Hassan, 2014) karena merasa kecewa dengan rezim Zainal Abidin bin Ali yang otoriter. Selain otoriter, selama pemerintahan Zainal Abidin bin Ali masih terdapat banyak kasus mengenai korupsi, pengangguran, kemiskinan, militer yang represif, dan lain sebagainya.

Masyarakat Suriah merasakan dampak gejala politik akibat semangat revolusi Bouazizi di Tunisia hingga kemudian melakukan serangkaian gerakan demonstrasi di beberapa wilayah Suriah. Demonstrasi tersebut bertujuan untuk menggulingkan Pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad yang juga otoriter. Bashar Al-Assad telah memimpin Suriah dalam beberapa tahun. Tak mengherankan apabila timbul semacam pro dan kontra diantara masyarakat selama masa kepemimpinannya. Ayahnya, Hafez Al-Assad, merupakan

seorang mantan Perwira Angkatan Udara Suriah dan juga mantan Presiden Suriah yang telah berkuasa selama tiga dekade (Macfarquhar, 2000). Hafez Al-Assad meraih kursi kekuasaan pada tahun 1970 dengan dibantu oleh jaringannya yang berada di Angkatan Udara dan Menteri Pertahanan dan bertahan hingga tahun 2000 (Quilliam, 2015). Sebelum Bashar Al-Assad memerintah Suriah, tonggak kepemimpinan akan diwariskan kepada saudaranya yakni Basil Al-Assad. Akan tetapi pada tahun 1994, Basil mengalami kecelakaan hingga merengang nyawanya. Sehingga Bashar Al-Assad maju menggantikan mendiang ayahnya.

Potret Hafez Al-Assad dengan anaknya Bashar Al-Assad sulit untuk digambarkan persamaannya. Seperti yang telah diketahui, Hafez memiliki pengalaman di militer selama bertahun-tahun. Ia menjadi tokoh kunci dalam kudeta militer 1966 yang mengantarkan masyarakat Alawi mendapatkan kekuasaan. Pada tahun 1970, ia secara resmi mengambil alih kekuasaan setelah berhasil mengalahkan saingannya. Berbanding terbalik dengan ayahnya, Bashar Al-Assad hanya memiliki sedikit latar belakang politik. Ketika ia menggantikan ayahnya tahun 2000, Bashar masih berusia 28 tahun dan merupakan seorang dokter mata yang tinggal di Inggris. Meskipun demikian, keduanya menggunakan ideologi yang sama untuk mempertahankan tampuk kepemimpinannya sebagai Presiden Suriah yakni Nushairiyah. (Byman, 2004, hal. 178).

Demonstrasi yang terjadi di Suriah disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Bashar Al-Assad yang cenderung otoriter dibarengi dengan pasukan keamanan Assad yang bertindak represif kepada masyarakat. Dibawah komando Assad pasukan keamanan Suriah bertindak semena-mena terhadap masyarakat. Akan tetapi, serangkaian demonstrasi yang terjadi di Suriah ditanggapi oleh rezim Assad sebagai pembangkangan. Sehingga rezim Assad merasa perlu untuk menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi para pengunjuk rasa. Bashar Al-Assad menggunakan kekuasaannya dengan jalur kekerasan yang semakin brutal. Menurut salah seorang teoritikus ilmu sosial

terbesar sepanjang zaman, Thomas Hobbes, mendefinisikan kekerasan sebagai keadaan alamiah manusia meliputi tindakan kejahatan, kasar, buas, cara berpikir yang pendek, dan adanya keinginan memerangi semua yang menggangukannya (Lubis, 1988, hal. 43).

Hal itu jelas tercermin sikap rezim Assad dalam kebijakan domestiknya yang cenderung melakukan tindakan kejahatan terhadap masyarakatnya sendiri. Demonstrasi yang terjadi di jalanan-jalanan kota yang menuntut adanya perubahan dari rezim yang berkuasa, dengan cepat justru telah berubah menjadi medan pertempuran multi-nasional yang tidak hanya melibatkan Pemerintah Suriah dan oposisi, melainkan menjadi semacam *proxy war* bagi negara-negara adidaya hingga memakan banyak korban.

Penggunaan kekerasan tersebut tercermin dalam menanggapi protes yang dilakukan sekelompok pelajar di kota Daraa sebagaimana telah disebutkan di atas, Assad dengan sigap memerintahkan saudara sepupunya yang merupakan seorang polisi, Jendral Atef Najib, untuk menangkap dan memenjarakan para pelajar tersebut. Akibatnya, penangkapan tersebut juga berujung pada unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat setempat agar pelajar tersebut dibebaskan dan akhirnya menimbulkan kegaduhan. Bahkan tragisnya, polisi menembaki para pengunjuk rasa hingga menyebabkan empat orang meninggal dunia (Fahham, 2014, hal. 38).

Sebagaimana yang diketahui, rezim Assad acapkali menggunakan cara-cara keji untuk menghentikan berbagai unjuk rasa yang terjadi di kota-kota Suriah seperti di kota Damaskus, Daraa, Homs, Baniyas serta tiga lokasi yang dijadikan pusat anti-pemerintah. Rezim Assad mengerahkan pasukan setianya menggunakan tank-tank dan kendaraan anti baja untuk mengontrol bahkan menembaki penduduk sipil yang melakukan unjuk rasa hingga menjatuhkan banyak korban (Fahham, 2014, hal. 41). Pada 8 April 2011, pasukan keamanan Assad menembaki para pengunjuk rasa yang tersebar di beberapa kota Suriah, dan dilaporkan jumlah korban yang meninggal dunia mencapai lebih dari 200 orang. Kemudian pada Jum'at, 22 April 2011, ketika sebagian besar

masyarakat pergi untuk mendirikan sholat Jum'at, sesuai sholat pasukan keamanan kembali menembaki masyarakat hingga berguguran korban sebanyak 75 orang (Fahham, 2014, hal. 41).

Selain kerap melakukan penembakan, rezim Bashar Al-Assad juga melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata kimia yang sangat berbahaya. Menurut catatan sejarah, penggunaan senjata kimia berbahaya ini mulai dilakukan sejak 2012 lalu hingga 2017 dan tak kunjung juga dihentikan. Bahkan Pemerintah Suriah secara terbuka di hadapan publik mengakui kepemilikan senjata kimia. Suriah memiliki beberapa jenis gas seperti gas mustard, *blister agent*, serta gas saraf misalnya gas sarin dan racun VX (Yuta Kawashima, 2018).

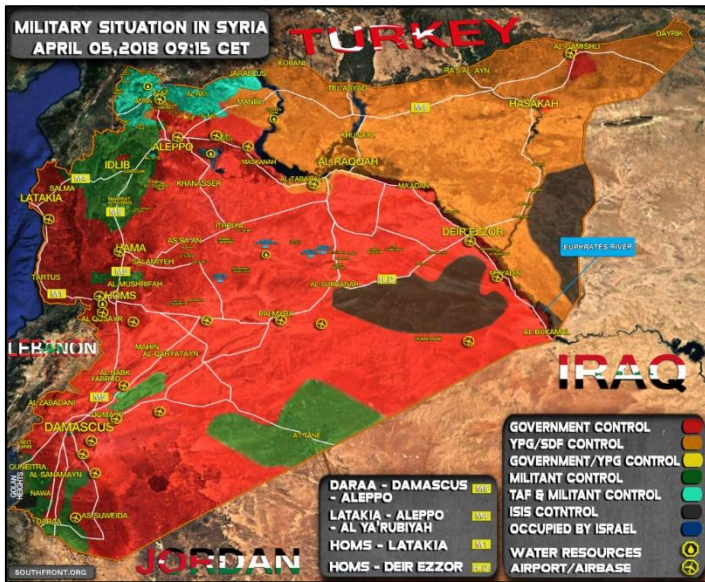
Tanpa berpikir panjang dan tanpa menimbang-nimbang dampak buruk seperti apa yang akan terjadi apabila senjata kimia tersebut mengenai secara langsung warga sipil Suriah, hal tersebut menjadi salah satu cara dari sekian banyak cara Assad untuk menghentikan demonstrasi di Suriah. Padahal sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Suriah, Jihad Makdissi mengatakan bahwasanya senjata kimia tersebut tidak akan digunakan untuk menyerang warga sipil Suriah, melainkan untuk menghadapi agresi eksternal (Yuta Kawashima, 2018). Sebagai salah satu contoh adalah kelompok-kelompok teroris yang ada di Suriah.

Benar saja, tidak lama setelah Juru Bicara mengatakan pernyataan tersebut, pada 23 Desember 2012 telah dilaporkan adanya serangan gas beracun yang didalangi rezim Assad yang menewaskan tujuh orang di kota Homs. Gas beracun tersebut telah menimbulkan efek samping berupa mual, penglihatan kabur, dan kesulitan bernafas. Penyerangan menggunakan senjata kimia masih berlanjut hingga beberapa waktu berikutnya. Di lain kesempatan, Assad menolak disalahkan atas tewasnya 25 orang di Khan Al-Assel dan daerah pinggiran kota Damaskus. Assad justru menyalahkan kelompok oposisi. Begitu pula sebaliknya, kelompok oposisi menuding pasukan keamanan Suriah di bawah payung perlindungan Assad yang telah melancarkan penyerangan keji

tersebut (Yuta Kawashima, 2018). Beranjak dari tindakan saling tuduh tersebut, penyerangan menggunakan gas-gas kimia beracun merupakan tindakan yang sangat keji. Pelakunya secara tidak langsung telah menghilangkan nyawa seseorang dan hal tersebut tentu termasuk ke dalam salah satu pelanggaran hak asasi manusia yakni pelanggaran terhadap hak hidup orang lain.

Tidak hanya serangan senjata kimia berbahaya, serangan pasukan Assad juga menggunakan bom dan rudal. Seperti halnya serangan untuk merebut wilayah Aleppo dimana Aleppo menjadi salah satu tempat berkumpul pihak oposisi yang ingin menggulingkan rezim Bashar Al-Assad. Wilayah Aleppo bagian timur merupakan wilayah yang sepenuhnya dikuasai oleh oposisi. Serangan besar-besaran digencarkan rezim Assad yang berupaya mengambil alih wilayah Aleppo tersebut. Pihak oposisi kewalahan menanggapi serangan pasukan Assad yang bertubi-tubi hingga memaksa mereka terdesak keluar Aleppo dan Aleppo berhasil direbut rezim Assad. Aleppo menambah daftar kota yang berhasil dikuasai oleh Pemerintah Suriah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1 Zona Militer di Suriah



Sumber: South Front, 2018

Dari gambar diatas terlihat Pemerintah Suriah masih berupaya mempertahankan wilayah dari kelompok oposisi. Wilayah-wilayah tersebut kerap kali menjadi arena pertarungan antara Pemerintah dan pihak oposisi yang selalu memakan korban jiwa dan menelan kerugian secara materiil yang tak terhitung pasti jumlahnya.

Di lain pihak, konflik tersebut bertambah pelik ketika hadir kelompok pemberontak/oposisi seperti *Syrian Democracy Forces* (SDF) yang dibekingi oleh Amerika Serikat, dan *Free Syrian Army* (FSA) atau Pasukan Pembebasan Suriah yang dibekingi oleh Turki. *Syrian Democratic Forces* sebenarnya merupakan koalisi yang terdiri dari aliansi milisi Kurdi, Arab, Turkmen, Suriah, dan Armenia yang berjihad melawan ISIS, Front Al-Nusra dan kelompok jihadis lainnya yang terlibat dalam perang sipil Suriah. Tujuan dibentuk kelompok *Syrian Democratic Forces* adalah untuk

mendirikan dan melindungi wilayah federal Rojava yang terletak di Suriah Utara (Syrian Civil War Map, 2017). Koalisi ini disebut-sebut sebagai koalisi yang kuat dan terorganisir dengan baik. Di bawah SDF terdapat kelompok-kelompok lain yang dinaungi oleh SDF seperti Unit Perlindungan Rakyat (YPG) dan Unit Perlindungan Wanita (YPJ). Unit-unit tersebut merupakan kelompok terdepan Suriah yang bekerja untuk Partai Pekerja Kurdistan (Lund, 2016). Pasukan Pembebasan Suriah sudah sejak awal konflik meletus telah menyatakan komitmennya guna menyelesaikan konflik di negaranya tersebut. Mereka telah melihat berbagai pembunuhan dan hal keji lainnya.

Selain kedua kelompok oposisi di atas, ISIS sebagai kelompok islamis radikal juga turut memainkan peran dalam konstelasi politik Suriah. ISIS muncul pada April 2013 silam yang dipimpin oleh Abu Bakar Al-Baghdadi (Syria Iraq: The Islamic State Militant Group, 2014). Semenjak kemunculannya mereka telah melakukan serangkaian aksi teror di berbagai belahan dunia pada umumnya dan di Suriah pada khususnya. Pada 29 Juni 2014, ISIS mendeklarasikan negara khilafah setelah berhasil merebut tiga kota penting di wilayah utara Irak, yakni Mosul, Tikrit, dan Tal Afar hanya dalam waktu satu pekan saja. Deklarasi negara khilafah ini disampaikan oleh juru bicara ISIS, Abu Muhammad Al-Adnani dengan pidato berjudul berbahasa Arab yakni *Hadza Wa'dullah* (Ini adalah Janji Allah). Pidato Abu Muhammad Al-Adnani disampaikan melalui pesan audio dan disebarakan melalui media massa ISIS, Al-Furqon. Selama kemunculannya beberapa tahun terakhir, ISIS dinilai kontroversial. Berbagai penolakan datang dari berbagai lini masyarakat internasional. Meski demikian, ISIS senantiasa menanamkan keyakinan terhadap para pengikutnya dengan jargon *Daulah Khilafah Baqiyah wa Tatamaddad* yang artinya negara khilafah akan tetap ada dan ekspansif (Kholidi, 2016).

Dalam konflik Suriah ini, pada dasarnya tidak hanya Amerika Serikat dan Turki saja yang turut memberi sokongan terhadap aktor-aktor yang terlibat perang. Rusia memposisikan diri sebagai sekutu Rezim Assad. Begitu juga dengan Iran

yang memiliki persamaan sekte dengan Rezim Assad yakni syiah. Di sisi yang lain, Turki bersama Amerika Serikat, Arab Saudi, dan negara lainnya mendukung pihak oposisi Suriah. Amerika Serikat mempunyai kepentingan terselubung dalam membantu para pemberontak Suriah melawan rezim Assad. Begitu pula dengan Rusia yang membekingi Bashar Al-Assad. Adapun salah satu alasan Rusia menyokong Bashar Al-Assad beserta pasukan militernya serta Amerika Serikat yang menempatkan diri untuk menyokong para pemberontak adalah mereka mensupply persenjataan bagi masing-masing pihak yang mereka sokong. Bagi negara kapitalis seperti Rusia dan Amerika, menyediakan senjata dalam artian bahwa menjual senjata tersebut akan membawa keuntungan yang cukup besar. Disamping mereka mendapatkan keuntungan secara materiil, kedua negara tersebut juga secara tidak langsung melanggengkan konflik yang terjadi Suriah. Dengan demikian mereka dapat melaksanakan kepentingan yang lain.

Tahun demi tahun, konstelasi konflik di Suriah bertambah rumit. Salah satunya disebabkan oleh faktor yang telah disebutkan diatas yakni tunggangan dari aktor lain. Hingga saat ini konflik berkepanjangan tersebut telah bertransformasi menjadi konflik berdarah dimana tiada hari tanpa pertumpahan darah akibat kebrutalan rezim Assad. Pembunuhan, pengeboman, penyerangan warga sipil, penculikan dan hal-hal mengerikan lainnya telah menjadi hal lumrah yang sering dapat dijumpai disana. Tak hanya warga sipil Suriah, kalangan aktivis hak asasi manusia pun tak luput menjadi target penyerangan Rezim Assad. Kebebasan mereka berbicara dalam membela korban konflik dibungkam begitu saja oleh Rezim Assad.

B. Dampak Konflik Suriah

Berbagai kecaman dan kritik atas penggunaan kekerasan Rezim Assad datang dari dunia internasional. Sejumlah organisasi yang mengatasnamakan hak asasi manusia (HAM) dan para Kepala Negara menyerukan pemberhentian kekerasan tersebut. Penggunaan kekerasan

oleh Rezim Assad disinyalir telah melahirkan dampak konflik yang meluas dalam berbagai aspek kehidupan di Suriah. Berikut beberapa dampak konflik Suriah:

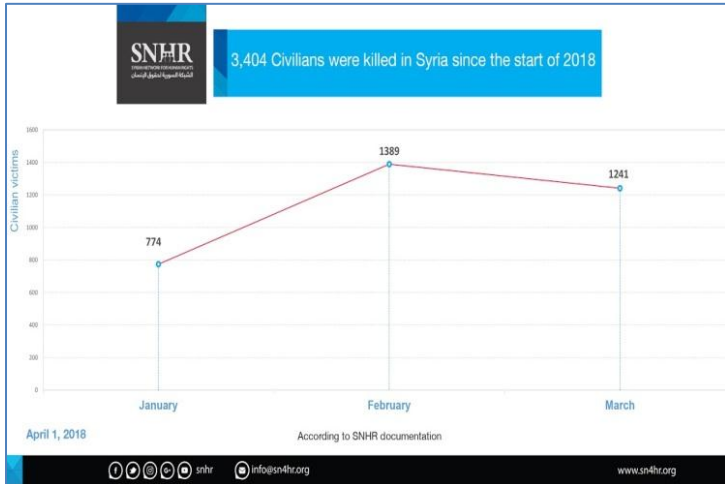
1. Ratusan Ribu Orang Tewas

Konflik perang sipil yang telah memasuki tahun kedelapan ini telah memakan ratusan ribu jiwa. Dari anak-anak, orang dewasa hingga lansia tak luput menjadi korban dari berbagai serangan yang dilakukan Rezim Assad. Berbagai organisasi setempat maupun organisasi internasional telah mengamati dan mengikuti perkembangan konflik Suriah. Namun, hingga saat ini belum ada data statistik yang secara akurat menyebutkan jumlah korban tewas dalam konflik tersebut. Masing-masing organisasi memiliki rilis yang berbeda-beda mengenai jumlahnya. Organisasi-organisasi tersebut berupaya menyajikan data korban tewas secara periodik per bulannya.

Organisasi-organisasi internasional tersebut menjalankan berbagai cara untuk mendata korban tewas akibat perang sipil. Salah satu caranya adalah dengan mengirimkan beberapa individu maupun kelompok untuk terjun ke lapangan selama perang sipil berlangsung. Organisasi-organisasi tersebut mengamati, mendokumentasikan, dan mendata para korban yang tewas. Selain korban tewas, mereka juga mencari informasi data mengenai para warga sipil yang terluka dan hilang.

Menurut *Syrian Network for Human Rights* (SNHR), sebuah organisasi independen Inggris yang didirikan pada Juni 2011 silam yang memonitori selama perang sipil di Suriah, SNHR dapat melaporkan informasi terkini berkenaan dengan jumlah korban tewas setiap hari maupun setiap bulannya. Terhitung sejak awal Januari-Maret 2018, korban tewas telah mencapai 3.404 jiwa (Syrian Network for Human Rights, 2018) dengan rincian seperti yang digambarkan grafik di bawah ini.

Grafik 2.1 Jumlah Korban Tewas Januari-Maret 2018



Sumber: Syrian Network for Human Rights, 2018

Hingga saat ini korban terus berjatuhan, baik dari kalangan warga sipil, pasukan Pemerintah Suriah, pihak oposisi, dan aktor-aktor lain yang terlibat. Jumlah korban tewas semenjak konflik meletus pada 2011 hingga 2018 lebih dari 500.000 jiwa (I Am Syria: Total Death Count Due To Conflict, 2018). Korban yang tewas tidak hanya disebabkan oleh perang yang selama ini terjadi, melainkan ada faktor alam seperti cuaca dingin yang sangat ekstrem. Lebih lanjut lagi, kondisi Suriah semakin memprihatinkan dengan segala keterbatasan warga sipil Suriah yang telah mengalami kerugian secara materiil karena perang. Akibat rumah-rumah hancur dihujani bom dan tembakan-tembakan, membuat mereka kehilangan tempat berlindung.

Banyak diantara warga sipil Suriah berusaha untuk melarikan diri ke negara terdekat. Baru-baru ini, berita yang cukup menggetarkan hati masyarakat internasional adalah mengenai ditemukannya tiga warga

Suriyah yang tewas membeku akibat musim dingin yang begitu ekstrem di perbatasan Suriyah-Lebanon. Menurut sebuah laporan, jenazah tersebut ditemukan di tempat yang biasa digunakan untuk penyelundupan. Sementara itu, pemerintah Lebanon memerintahkan pasukannya untuk tetap berpatroli di sekitar perbatasan guna mencari pengungsi Suriyah yang masih berusaha melarikan diri dari kecamuk konflik.

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh UNHCR pada 21 Januari 2018, sebanyak 15 warga Suriyah yang sedang melarikan diri ke Lebanon telah tewas akibat menerobos badai salju di dekat perbatasan Masnaa, Lebanon Timur. Korban tersebut terdiri dari wanita, laki-laki, dan anak-anak. Salah satu di antara warga Suriyah tersebut adalah wanita hamil. Wanita tersebut berhasil selamat dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh warga lokal dan pasukan patroli yang sedang berjaga (UNHCR, 2018).

Peristiwa tersebut telah mengilustrasikan bahwa kondisi internal di Suriyah semakin memburuk, dengan adanya perang yang tak kunjung menemukan tanda-tanda akan berakhir, hingga menyebabkan hilangnya tempat tinggal warga Suriyah. Kondisi tersebut telah memaksa mereka menetap di kamp pengungsian yang tragis. Bahkan menurut sebuah laporan, kamp pengungsian tersebut hanya menggunakan alat seadanya seperti menggunakan terpal plastik guna menangkal angin, hujan dan salju di kala musim dingin tiba.

2. Kerugian Materiil dan Rusaknya Sarana-Prasarana Publik

Selain menewaskan banyak warga sipil, perang sipil tersebut turut menjadikan rumah tinggal warga Suriyah dan sarana-prasarana publik sebagai objek pertempuran. Berdasarkan data yang dirilis UNESCO tahun 2015, hingga akhir tahun 2014 di kota-kota tertentu di Suriyah seperti Aleppo dan Homs, sebanyak 50% rumah warga hancur akibat perang (Pars Today,

2017). Rumah-rumah warga telah hancur menjadi puing-puing dan tidak layak untuk ditempati.

Beberapa rumah sakit dan fasilitas medis pun turut menjadi target serangan bom-bom Rezim Assad. Seperti hancurnya beberapa rumah sakit dan klinik di barat laut Suriah yang mengalami rusak berat dalam kurun waktu sebulan saja. Rumah sakit tersebut hancur akibat serangan udara yang dilakukan pasukan Rezim Assad dan sekutunya, Rusia (Firmansyah, 2017). Padahal rumah sakit tersebut menjadi tempat bagi para korban perang yang terluka. Namun kini, rumah sakit menjadi salah satu tempat yang berbahaya di Suriah bagi warga sipil maupun tenaga medis. Bahkan, serangan tersebut juga menewaskan banyak tenaga medis. Menurut laporan *Syrian American Medical Society* dan *Multi-Aid Programs*, sebanyak 782 jiwa tenaga medis tewas dari Maret 2011 hingga September 2016 (Tempo, 2017). Tenaga medis tersebut dengan sengaja ditergetkan menjadi sasaran penyerangan.

Menurut laporan UNICEF, kondisi konflik di Suriah semakin memburuk hari demi hari. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Ghouta Timur, sebuah wilayah yang terletak 10 kilometer dari Kota Damaskus. Sebanyak 137 anak-anak berusia 7 bulan hingga 17 tahun mengidap gagal ginjal, malnutrisi, dan luka-luka. Bahkan UNICEF menambahkan bahwa pada 9 Desember 2017 sebanyak lima anak telah meninggal dunia karena tidak mendapatkan perawatan medis yang layak karena rumah sakit dan fasilitas medis yang rusak akibat konflik tersebut (UNICEF, 2017).

Kemudian, sekolah-sekolah di Suriah mengalami rusak parah. Sebagian sekolah telah hancur akibat serangan Rezim Assad dan sisanya digunakan sebagai tempat pengungsian warga sipil Suriah. Di Suriah terdapat 1,75 juta anak telah putus sekolah. Mereka dijadikan sasaran kekerasan konflik antara Rezim Assad dan pihak oposisi seperti eksploitasi anak untuk direkrut

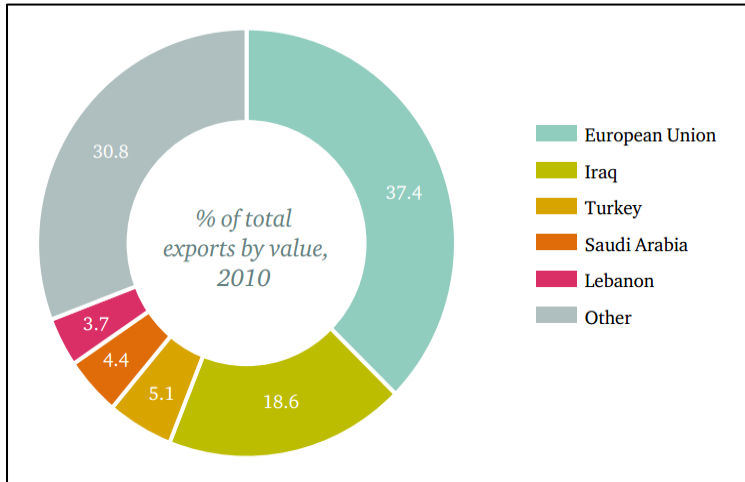
sebagai tentara militer, mempekerjakan anak di bawah umur, dan lain sebagainya (UNICEF, 2017).

Tidak hanya sampai disitu, sasaran penghancuran lainnya adalah tempat-tempat ibadah dan situs-situs bersejarah di Suriah. Hingga tahun 2016, sebanyak 47 tempat ibadah dan beberapa situs bersejarah hancur lebur oleh serangan pasukan militer Assad dan Rusia (Hanifan, 2016). Seperti yang diketahui, Suriah merupakan negara yang kaya akan peninggalan sejarah. Sebab, negara ini masuk ke dalam kawasan “bulan sabit subur”, yang memiliki kisah peradaban dunia (Nasrul, 2014). Namun, kini beberapa bangunan yang dikukuhkan sebagai situs-situs bersejarah telah menyisakan puing-puing saja.

3. Ekonomi dan Perdagangan Internasional Memburuk

Suriah merupakan negara yang terletak di Asia Barat di sepanjang bagian timur Laut Mediterania. Penduduk Suriah berjumlah 23 juta jiwa. Sebelum adanya konflik, kondisi perekonomian Suriah cukup baik. Suriah mengandalkan beberapa sektor andalan seperti minyak bumi, gas, industri, pertanian, dan pelayanan jasa. Sektor minyak mentah dan minyak bumi, produk tekstil serta hasil pertanian banyak diekspor ke pasar-pasar Eropa dan Arab. Perdagangan internasional yang dilakukan Suriah dengan negara-negara lain berhasil membuat pendapatan nasional Suriah terus tumbuh hingga mencapai angka 4,7% sepanjang 2000-an (Syrian Law Journal, 2017). Berikut destinasi komoditi ekspor Suriah ke beberapa negara serta total presentase ekspor sebelum konflik internal bergejolak.

Grafik 2.2 Destinasi Komoditi Ekspor Suriah Sebelum Konflik



Sumber: Research Paper of David Butter “*Syria’s Economy: Picking up the Pieces*”, 2015

Perekonomian Suriah mengalami fluktuasi. Inflasi terus membumbung tinggi, harga bahan makanan naik, solar dan berbagai barang impor jumlahnya terbatas dikarenakan banyak negara yang memberi sanksi terhadap Suriah. Seperti halnya Uni Eropa yang berhenti mengimpor minyak dari Suriah. Tidak hanya itu, Jerman juga menghentikan kerjasama luar negeri dengan Suriah kecuali dalam dua hal yakni proyek pembangunan sekolah di kamp pengungsi Palestina dan pada penyediaan air bersih bagi warga Suriah. Karena hal tersebut bermanfaat secara langsung bagi warga Suriah, bukan bagi pemerintah (Farid, 2012).

Asumsi beberapa ahli ekonomi mengatakan, selama kerusakan akibat perang terus berlanjut hingga beberapa tahun mendatang, dan mengakibatkan kerusakan tersebut semakin meluas, maka dapat diprediksi bahwa perekonomian Suriah akan terus

memburuk seiring berjalannya waktu. Hal tersebut tentu akan menarik dana eksternal (dana bantuan kemanusiaan), serta investasi dari negara pendukung Suriah yakni Rusia dan Iran, maupun negara-negara lain. Semakin menipisnya sumber daya pemerintah, membuat Suriah akan terus bergantung pada bantuan dari luar.

4. Sektor Pertanian dan Pangan Melemah

Suriah terletak di sepanjang hamparan timur Laut Mediterania dan sebelah utara Lebanon dan Israel. Suriah juga membentang hingga ke timur dan tenggara yang berbatasan dengan Iraq dan Yordania. Hampir 70% wilayah Suriah dipenuhi oleh padang rumput yang gersang dan rumput-rumput yang cukup sulit untuk menggembala hewan ternak. Curah hujan di Suriah hanya berkisar 150-600 mm per tahun. Produk petani lokal biasanya didominasi oleh kacang-kacangan (New Agriculturist, 2002).

Pada saat awal munculnya demonstrasi tahun 2011, sektor pertanian Suriah menyumbang sekitar seperlima dari produk domestik bruto Suriah. Jumlah tersebut semakin menurun beberapa waktu berikutnya diakibatkan oleh konflik. Pada tahun 2010 saham sudah mulai bergeser dimana pertanian hanya mencapai 13,2%. Menurut sebuah laporan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization*) dan *World Food Programme* pada Juli tahun 2013, merujuk pada sebuah studi bersama ke Suriah pada bulan Mei-Juni 2013, sebanyak 80% penghasilan utama masyarakat Suriah berasal dari sektor pertanian (Butter, 2015, hal. 13). Menyusul laporan terbaru dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia pada 2017, aset pertanian Suriah mengalami kerugian besar yang diperkirakan mencapai 16 milyar USD. Kerugian tersebut meliputi 3 milyar USD seperti kerusakan traktor, mesin-mesin pertanian, rumah kaca, sistem irigasi, dan fasilitas-fasilitas pengolahan produk pertanian yang lain. Sebanyak 6,3 milyar USD terdiri

dari kerugian produksi tanaman dan pangan. Di sektor peternakan kerugian mencapai 5,5 milyar USD dan 80 juta USD untuk sektor perikanan (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2017).

Konflik yang sedang terjadi membawa dampak buruk bagi sektor pertanian Suriah dikarenakan lahan-lahan petani dirambah oleh pasukan keamanan Assad dalam melakukan misinya mengontrol dan menindak penduduk sipil yang memberontak. Selain itu, kelangkaan pupuk, benih, dan pestisida turut menjadi masalah petani setempat (Butter, 2015, hal. 14). Sehingga hal tersebut juga membawa efek negatif bagi kebutuhan pangan masyarakat Suriah. Masyarakat mengalami kesulitan dalam mencari dan membeli makanan untuk bertahan hidup karena harga pangan yang melonjak naik.

5. Produksi Energi Semakin Menyusut

Minyak dan gas memainkan bagian penting dalam perekonomian Suriah sebelum konflik meletus tahun 2011. Terbukti ekspor minyak bumi pada tahun 2010 telah memberi keuntungan sebanyak 5,5 milyar USD. Suriah menghasilkan sekitar 385.000 barel per hari pada tahun yang sama. Dimana sekitar 150.000 barel per hari diekspor diantaranya ke negara-negara tetangga seperti Lebanon, Turki dan Yordania. Sedangkan 195.000 barel perhari dihasilkan oleh kilang-kilang minyak yang berada di kota Homs dan Baniyas untuk dikonsumsi penduduk lokal (Butter, 2015, hal. 15).

Produksi minyak tersebut dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan nasional Suriah diantaranya *Syrian Petroleum Company*, yang dapat memproduksi sekitar 195.000 barel per hari yang diperoleh dari Provinsi Hasakeh, Suriah. Kemudian *Al-Furat Petroleum Company* (AFPC) yang dapat memproduksi minyak sebanyak 92.000 barel per hari. Minyak tersebut disuling dari lembah Sungai Eufrat. Perusahaan tersebut telah beroperasi sejak 1980-an dan mencapai puncaknya

pada awal tahun 2000-an yang mampu menghasilkan 400.000 barel per hari sebelum terjadi penurunan signifikan akibat adanya konflik. Produsen-produsen minyak Suriah tersebar di wilayah lembah sungai Eufkrat, Provinsi Hasakeh, Palmyra Barat, dan Raqqa. Diantara produsen tersebut antara lain Gulfsands, Sinopec, *China National Petroleum Corporation* (CNPC) (Butter, 2015, hal. 15-16). Berikut merupakan tabel dari produksi minyak Suriah pada permulaan meletusnya konflik tahun 2011.

Tabel 2.1 Produksi Minyak Suriah Sebelum Konflik

Company (operator)	Location	Output
SPC	Hasakeh and Raqqa	195,000
AFPC (Shell)	Euphrates valley	92,000
DZPC (Total)	Euphrates valley	21,000
SIPC (Sinopec)	S Hasakeh	20,000
Dijla (Gulfsands)	NE Hasakeh	24,000
Kawkab (CNPC)	NE Hasakeh	12,000
Rasheed (IPR)	Euphrates valley	4,000
Hayan (INA)	West of Palmyra	9,000
Albu-Kamal (Tatneft)	S Euphrates valley	2,000
Total		387,000*

* Total output includes condensates, estimated at 8,000 b/d.

Sumber: Research Paper of David Butter “*Syria’s Economy: Picking up the Pieces*”, 2015

Ketika kekejaman Assad terhadap masyarakat Suriah terdengar oleh Uni Eropa, maka Uni Eropa bereaksi dengan memberikan sanksi dengan larangan impor minyak dari Suriah. Sanksi tersebut berlaku mulai bulan September 2011. Tahun 2012 sanksi Uni Eropa semakin diperketat dengan melakukan embargo terhadap peralatan-peralatan yang dapat digunakan untuk menghasilkan minyak. Suriah semakin mengalami kerugian, karena dua konsumen minyak

mentah Suriah yang berasal dari Uni Eropa yakni Italia dan Jerman dilarang mengimpor minyak dari Suriah merujuk pada sanksi yang telah ditetapkan Uni Eropa tersebut (Butter, 2015, hal. 16).

Setibanya di penghujung tahun 2000, pada dasarnya sektor gas alam berhasil menarik investasi besar-besaran dari perusahaan-perusahaan asing. Sebut saja *Ebla Gas Company* dan *Hayan Petroleum* yang masing-masing dioperasikan oleh Perusahaan Energi Kanada dan Perusahaan Kroasia. Kedua perusahaan energi tersebut telah berhasil meningkatkan total hasil produksi gas alam sebesar 8 milyar m³ pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 8,7 milyar m³ pada tahun berikutnya. Gas alam tersebut digunakan sebagai pembangkit listrik Suriah (Butter, 2015, hal. 16).

Memburuknya keadaan Suriah akibat perang sipil membuat produksi gas alam mengalami kemerosotan. Jaringan pipa minyak dan gas bumi serta peralatan transmisi listrik mengalami kerusakan. Menurut *Central Intelligence Agency Fact Book*, produksi industri energi Suriah telah mengalami penyusutan sebesar 36% pada tahun 2012 (Tverberg, 2013). Dengan demikian, perang sipil telah berkontribusi terhadap penurunan konsumsi energi.

C. Problematika Pengungsi Suriah

Konflik panjang di Suriah yang telah merenggut ratusan ribu jiwa, belakangan memicu krisis pengungsi terutama di beberapa negara Timur Tengah dan Eropa. Warga sipil Suriah mencari tempat yang lebih aman guna bertahan hidup dari kecamuk konflik. Lebih dari lima juta penduduk Suriah telah mengungsi dan tersebar di beberapa negara tetangga di Timur Tengah. Arus pengungsi tersebut semakin meluas hingga menuai perselisihan di antara negara-negara yang menjadi tujuan para pengungsi tersebut. Ada beberapa negara menerapkan kebijakan pintu terbuka terhadap pengungsi seperti Turki, Lebanon, Jerman, dan lain sebagainya. Di antara

negara-negara yang menolak adalah Hungaria, Republik Ceko, Polandia, dan Slovakia.

Salah satu negara yang menerima pengungsi Suriah di Timur Tengah adalah Lebanon. Lebanon merupakan negara yang terletak di sebelah timur laut mediterania. Wilayahnya berbatasan dengan Suriah, sehingga banyak warga Suriah yang mengungsi ke Lebanon karena jaraknya yang cukup dekat. Negara beribu kota Beirut ini dianggap masyarakat internasional enggan menerima pengungsi Suriah. Namun, menurut data yang dirilis oleh UNHCR, sebanyak 1.001.051 warga Suriah nyatanya telah teregistrasi oleh Pemerintah Lebanon (Syria Regional Refugee Response, 2017).

Pengungsi Suriah tersebar di seluruh penjuru Lebanon. Mereka ditempatkan di kamp-kamp yang disediakan pemerintah. Meski Pemerintah Lebanon menerima para pengungsi Suriah tersebut, namun timbul kekhawatiran dari pemerintah setempat akan kemungkinan buruk yang terjadi. Mantan Perdana Menteri Lebanon, Saad Al-Hariri (2009-2011), menyatakan kekhawatiran akan adanya kerusuhan yang terjadi antara pengungsi Suriah dan masyarakat setempat. Hal itu juga mendorong Pemerintah Lebanon enggan menambah kamp-kamp pengungsi resmi karena merasa takut akan kehadiran pengungsi Suriah secara permanen sehingga bermunculan kamp-kamp pengungsi informal yang tersebar di beberapa wilayah Lebanon.

Pada Juli 2017, pasukan keamanan Lebanon menangkap pemuda negaranya yang melakukan kekerasan terhadap pengungsi Suriah (Arab News, 2017). Kekerasan tersebut diawali dengan penghinaan terhadap negara Suriah dan masyarakatnya dan diakhiri dengan kekerasan fisik. Kekerasan tersebut diunggah salah seorang warga dan menimbulkan kecaman dari banyak aktivis di media sosial. Hal tersebut telah meningkatkan ketegangan antara Suriah dan Lebanon.

Lebih jauh, Pemerintah Lebanon semakin menekan arus pengungsi Suriah untuk masuk Lebanon dengan cara pemberlakuan visa. Sedangkan pada Januari 2015, pemerintah Lebanon mengeluarkan kebijakan agar pengungsi Suriah memperbaharui izin tinggal (VOA Islam, 2017). Namun,

banyak diantara pengungsi yang enggan memperbaharui izin tinggal tersebut dan membuat mereka tidak memiliki status hukum yang legal. Tanpa adanya status hukum yang legal, para pengungsi Suriah di Lebanon semakin sulit untuk mencari pekerjaan, mengakses pendidikan, kesehatan, dan aspek vital lainnya.

Liga Arab menilai kondisi pengungsi Suriah di Lebanon cukup memprihatinkan. Dengan demikian, Liga Arab berupaya membantu dengan menggelontorkan dana guna meringankan kondisi pengungsi Suriah. Dana tersebut berasal dari negara donor seperti Arab dan lain sebagainya. Liga Arab juga mengirimkan delegasi untuk memantau perkembangan situasi pengungsi disana terutama dalam hal sanitasi.

Pada September 2015, organisasi antarpemerintah yang berisi negara-negara Eropa (Uni Eropa) menetapkan sebuah kebijakan untuk merelokasi pengungsi yang masuk ke wilayah Eropa melalui Yunani, Italia, dan Hungaria. Uni Eropa menetapkan kuota sebanyak 120.000 pengungsi bagi masing-masing negara anggota. Kebijakan tersebut menuai reaksi yang beragam dari negara anggota. Mayoritas negara anggota menyatakan sepakat atas penetapan kuota tersebut, mengingat arus gelombang pengungsi Suriah ke Eropa semakin meningkat pada tahun 2015. Namun, beberapa negara Eropa Tengah seperti Hungaria, Republik Ceko, Polandia, dan Slovakia menolak dengan tegas rencana Uni Eropa tersebut.

Salah satu negara anggota Uni Eropa yang sepakat dengan rencana Uni Eropa dalam merelokasi pengungsi Suriah adalah Jerman. Kanselir Jerman Angela Merkel menetapkan kebijakan pintu terbuka bagi para pengungsi Suriah. Kebijakan pintu terbuka Jerman terhadap para pengungsi tersebut didorong oleh rasa solidaritas masyarakat Jerman yang cukup tinggi. Selain itu, dukungan dari partai sayap kiri juga semakin memantapkan Jerman untuk menerima para pengungsi tersebut.

Namun, dibalik hal itu masih terdapat penolakan dari berbagai golongan masyarakat Jerman. Seperti halnya yang dilakukan oleh partai sayap kanan Neo-Nazi yang menolak kehadiran pengungsi Suriah tersebut. Lebih jauh lagi, setelah

kejadian serangan Paris yang terjadi 13 November 2015 lalu, masyarakat Jerman mulai timbul kekhawatiran akan penyusupan kelompok teroris melalui gelombang pengungsi Suriah.

Sebuah situs web setempat bernama *The Local Germany*, melaporkan bahwa pihak kepolisian Jerman pada Selasa, 21 November 2016 telah menangkap enam pengungsi Suriah yang diklaim sebagai bagian dari kelompok islamis radikal ISIS. Keenam tersangka diduga telah merencanakan aksi teror di sejumlah tempat umum menggunakan senjata dan bahan peledak (The Local Germany, 2017). Akan tetapi beberapa hari kemudian keenam terduga teroris tersebut dibebaskan karena kurangnya bukti yang mendukung mereka telah merencanakan aksi teror.

Pada awal tahun 2017, salah seorang anggota partai sayap kanan Jerman Neo-Nazi, berupaya membakar sebuah gedung olahraga yang sedang dialihfungsikan sebagai kamp penampungan pengungsi. Akibat tindakan tersebut, pemerintah Jerman menelan kerugian sebesar 3,7 juta USD dan tersangka dijatuhi hukuman delapan tahun penjara (Sharkov, 2017).

Sementara, berbanding terbalik dengan Jerman, Hungaria, Republik Ceko, Polandia, dan Slovakia tidak menyetujui rencana Uni Eropa dalam menetapkan kuota pengungsi. Hungaria merupakan salah satu negara yang enggan menerima pengungsi Suriah. Hungaria hanya menampung ribuan pengungsi dan biasanya pengungsi tersebut singgah di Hungaria untuk melanjutkan perjalanan menuju Jerman dan negara Eropa lainnya.

Negara di Eropa Tengah ini, baik pemerintah maupun masyarakat Hungaria memiliki sikap anti orang asing (*xenophobia*) terhadap para pengungsi Suriah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Hungaria merupakan masyarakat yang homogen. Sikap *xenophobia* tersebut semakin mempersulit keberadaan pengungsi yang ada di Hungaria. Sebab, pemerintah Hungaria menetapkan kebijakan-kebijakan yang merugikan para pengungsi Suriah.

Dalam menekan laju pengungsi Suriah yang ingin menetap atau hanya sekedar singgah di Hungaria, pada tahun 2015 pemerintah setempat mendirikan pagar pembatas pertama antara Hungaria-Serbia dan Hungaria Kroasia. Pada April 2017, pemerintah Hungaria telah menyelesaikan pembuatan pagar pembatas kedua dengan kualitas pagar yang lebih kuat dari pagar pembatas pertama, serta dilengkapi dengan teknologi canggih seperti kamera dan alarm. Pagar pembatas tersebut membentang 155 kilometer sepanjang perbatasan Hungaria-Serbia (Sandford, 2017).

Lebih lanjut, Pemerintah Hungaria menolak untuk berpartisipasi dalam melaksanakan proposal Uni Eropa yang menganjurkan negara-negara anggota menerima para pengungsi dan pencari suaka dengan kuota sebesar 120.000 untuk masing-masing negara. Kemudian Uni Eropa menetapkan kuota bagi Hungaria sebesar 1.294 jiwa. Namun, Pemerintah Hungaria tetap enggan menerima pengungsi tersebut. Bahkan pemerintah setempat melakukan sebuah referendum terkait penerimaan pengungsi Suriah. Sebanyak 73% menolak referendum tersebut (Bayer, 2016). Pemerintah Hungaria berupaya dengan cara-cara yang bervariasi agar menekan laju pengungsi Suriah masuk ke negaranya.

Di saat Jerman menerapkan kebijakan pintu terbuka bagi para pengungsi Suriah, Republik Ceko mengikuti jejak Hungaria menolak dengan tegas program pembagian kuota Uni Eropa. Pemerintah setempat berupaya menekan laju pengungsi Suriah untuk memasuki wilayah Republik Ceko. Salah satunya adalah dengan menjebloskan pengungsi Suriah ilegal ke dalam penjara. Masa penahanan para pengungsi ilegal tersebut berkisar 40-90 hari. Tindakan tersebut dinilai efektif untuk mengerem jumlah pengungsi Suriah agar tetap rendah.

Tidak hanya memenjarakan para pengungsi ilegal, pemerintah setempat juga meminta para pengungsi membayarkan sejumlah uang selama masa penahanan mereka. Pembayaran tersebut ditujukan kepada pengungsi maupun imigran yang memasuki Republik Ceko. Negara ini dikecam oleh Komisaris Tinggi PPB untuk Hak Asasi Manusia karena

meminta sejumlah uang kepada pengungsi dan imigran tanpa dasar hukum yang jelas.

Para pengungsi ilegal tersebut ditempatkan di sebuah penjara bernama Bila Jezova yang terletak 80 kilometer sebelah utara Kota Praha. Menurut Menteri Kehakiman Republik Ceko yakni Robert Pelikan, kondisi penjara di Bila Jezova lebih buruk dibanding penjara-penjara lain yang ada di Republik Ceko. Sedangkan menurut laporan seorang pengacara publik Republik Ceko yang bernama Anna Sabatova, ia mengatakan bahwa saat ia berkunjung ke penjara Bila Jezova tersebut banyak terjadi pelanggaran fisik terhadap tahanan orang dewasa. Bahkan, pelanggaran tersebut dilakukan di hadapan anak-anak mereka. Anna Sabatova mengatakan bahwa terdapat kurang lebih 100 anak yang turut ditahan di penjara tersebut (Sims, 2015).

Republik Ceko mendapat kewajiban dari Uni Eropa untuk menerima 2.691 pengungsi dari skema kuota 120.000 masing-masing negara. Namun, pada 5 Juni 2017, Pemerintah Republik Ceko secara resmi menghentikan penerimaan pengungsi. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Menteri Dalam Negeri yakni Milan Chovanec pada konferensi pers setelah rapat kabinet. Milan Chovanec beralasan bahwa pemberhentian penerimaan pengungsi tersebut dikarenakan alasan keamanan nasional yang semakin terancam (TRT World, 2017).

Polandia melakukan hal serupa dengan Hungaria dan Republik Ceko dalam hal penolakan relokasi pengungsi. Kebijakan Uni Eropa dalam relokasi pengungsi tahun 2015 lalu, bertepatan dengan pemilihan parlemen baru Polandia yang mengantarkan Partai Hukum dan Keadilan meraih kemenangan. Dengan bergantinya parlemen ini, arah kebijakan terhadap pengungsi berubah. Kebijakan Partai Hukum dan Keadilan memperlihatkan sikap anti terhadap pengungsi.

Jaroslav Kaczynski yang notabene merupakan pemimpin Partai Hukum dan Keadilan mengatakan dalam siaran politik pada laman Youtube bahwa Polandia menolak kebijakan Uni Eropa untuk menampung para pengungsi

dengan alasan tidak ada mekanisme yang dapat menjamin keamanan nasional Polandia (Armandhanu, 2016). Keputusan Polandia diambil menyusul serangan kelompok radikal ISIS yang terjadi di Paris dan Brussel yang menggemparkan dunia itu.

Sedangkan negara tetangga Polandia sebelah utara yakni Slovakia menolak untuk menerima pengungsi Suriah yang beragama islam. Pemerintah Slovakia mengeluarkan kebijakan diskriminatif yang hanya menerima pengungsi Suriah yang beragama kristen. Mayoritas penduduk Slovakia beragama kristen katolik yakni sebesar 5,4 juta jiwa (Fenton, 2016). Fakta tersebut menjadi alasan bagi Slovakia untuk menolak pengungsi muslim Suriah.

Perdana Menteri Slovakia Robert Fico mengatakan bahwa multikulturalisme adalah khayalan belaka. Menurut Robert Fico, apabila sebuah negara mengizinkan pengungsi atau imigran masuk wilayahnya, maka negara tersebut harus menghadapi kemungkinan terburuk munculnya berbagai masalah. Robert Fico merujuk pada serangan Paris pada November 2015 lalu.

Menanggapi penolakan tegas khususnya dari Hungaria, Republik Ceko, dan Polandia, pada Selasa, 13 Juni 2017 Uni Eropa merilis sebuah tindakan legal dalam menanggapi penolakan ketiga negara tersebut (Dawn, 2017). Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Migrasi Uni Eropa, Dimitris Avramopoulos, ia menyesali sikap masing-masing negara yang menolak. Ia melanjutkan bahwa Komisi Uni Eropa telah memutuskan untuk mengeluarkan prosedur pelanggaran terhadap Hungaria, Republik Ceko, dan Polandia. Lebih lanjut, ia berharap ketiga negara tersebut dapat mempertimbangkan kembali posisi dan sikap mereka terhadap permasalahan ini.

Pengadilan Tinggi Uni Eropa juga telah menolak pengaduan Hungaria dan Slovakia mengenai pembatalan pembagian kuota wajib pengungsi bagi masing-masing negara anggota. Pengadilan Tinggi Uni Eropa yang berlokasi di Luksemburg menyatakan bahwa pembagian kuota tersebut bertujuan membantu Italia dan Yunani mengatasi dampak krisis pengungsi tahun 2015. Pembagian kuota pengungsi

tersebut telah disetujui sebelumnya oleh mayoritas anggota Uni Eropa. Keputusan Pengadilan Tinggi Uni Eropa tersebut bersifat final sehingga mereka tetap menetapkan bahwa masing-masing negara anggota harus mengambil bagian atas pembagian kuota wajib pengungsi.

Jika Hungaria, Republik Ceko, dan Polandia tetap bersikeras menolak ketentuan pembagian kuota wajib pengungsi tersebut, maka Pengadilan Tinggi Uni Eropa akan mempertimbangkan langkah terakhir dalam prosedur pelanggaran tersebut dengan membawa ketiga negara tersebut untuk dapat diproses di Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi Uni Eropa memiliki kewenangan untuk mengenakan denda finansial pada negara-negara yang tidak mematuhi undang-undang Uni Eropa (Euronews, 2017).

Di lain pihak, PBB menganggap bahwa krisis pengungsi yang terjadi di Eropa merupakan yang terburuk sejak meletusnya Perang Dunia II. Hal itu disampaikan oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon, pada Sidang Umum PPB ke-70 di New York. Dalam Sidang Umum tersebut membahas secara khusus mengenai krisis pengungsi Suriah. PBB mendesak Eropa untuk mengambil sikap dalam menangani krisis pengungsi dan memastikan negara-negara anggota Uni Eropa dapat memperlakukan pengungsi dengan baik.

Selain itu, respon lain ditunjukkan oleh Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi terhadap permasalahan pengungsi di Eropa. Filippo Grandi, Ketua Komisi Tinggi PBB menanggapi perihal krisis tersebut dengan mengusulkan adanya pembentukan jalur aman dan sistem registrasi umum bagi para pengungsi untuk lebih menjamin keamanan serta memudahkan pertukaran data pengungsi antarnegara anggota Uni Eropa. Grandi juga mendesak negara-negara anggota tersebut untuk memperhatikan pengungsi anak-anak tanpa orang tua yang sangat rentan jatuh ke tangan penyelundup. Selain itu, Grandi juga menekankan pentingnya menerapkan kebijakan relokasi diantara negara-negara anggota. (United Nations Regional Information Centre for Western Europe, 2016). Dengan demikian, negara-negara anggota Uni Eropa dapat

berkontribusi bersama dan membantu Italia dan Yunani
menangani gelombang pengungsi.

